

Analisis Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)

(Studi kasus : Kawasan Agropolitan Kab. Pesisir Selatan)

Skripsi

oleh :

ASWANDI
00 164 051



**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG, 2006

ANALISIS PELAYANAN INSEMINASI BUATAN (IB) *(Studi kasus : Kawasan Agropolitan Kabupaten Pesisir Selatan)*

Aswandi, Dibawah bimbingan
Ir. Fuad Madarisa, M.Sc dan Ir. Boyon, MP
Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan Fakultas Peternakan
Universitas Andalas Padang 2005

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 27 Mei sampai dengan 30 Juni 2005, dengan tujuan bagaimana penyelenggaraan pelayanan IB di Kawasan Agropolitan. Penelitian ini menggunakan metode survey dan wawancara langsung dengan responden. Responden dalam penelitian ini adalah Inseminator sebanyak 4 orang dan Peternak yang ternaknya menjadi akseptor IB sebanyak 35 orang.

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah : Identifikasi tanda-tanda gejala birahi, waktu pelaporan, cara pelaporan, siapa yang melaporkan. Waktu pelayanan IB, Biaya pelayanan IB, Jenis pelayanan yang diberikan, Sarana dan prasarana pelayanan, Kemampuan pemberi pelayanan (Inseminator).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelayanan IB yang terjadi di Kawasan Agropolitan masih belum tepat dan benar hal ini dikarenakan identifikasi tanda-tanda gejala birahi yang dilaporkan Peternak masih kurang tepat. Waktu pelayanan yang dilakukan oleh Inseminator masih kurang tepat yaitu lebih dari 6 jam setelah pelaporan dari peternak. Biaya untuk satu kali IB di Kawasan Agropolitan rata-rata 25.000 rupiah. Pelayanan yang dilakukan Inseminator dilapangan yaitu berupa IB, PKB, Keswan, Proses melahirkan. Sarana dan prasarana yang dimiliki Inseminator yang berada di Kawasan agropolitan pada umumnya masih kurang lengkap seperti alat komunikasi dan transportasi. Sarana operasional (Plastik sheat dan plastik gloves, kontainer lapangan serta bangunan pos IB). Rata-rata kemampuan Inseminator yang berada di Kawasan Agropolitan masih sangat rendah ini terlihat dari besarnya S/C rata-rata 6,3 dan CR 16,2 %. Peran dan fungsi dari Kantor Peternakan kabupaten dalam pengembangan program IB masih kurang maksimal ini terlihat tidak adanya peningkatan jumlah akseptor IB dari tahun ke tahun, tidak adanya pengawasan dilapangan tentang kerja Inseminator, tidak lengkapnya penyediaan sarana dan prasarana dalam proses pelayanan IB, tidak adanya pencatatan yang lengkap tentang pelaksanaan IB yang berada di Kawasan Agropolitan dan tidak adanya pencatatan mengenai infentaris barang-barang pelayanan IB.

Kata Kunci : IB, Pelayanan.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Peternakan dimasa datang diarahkan untuk mewujudkan kondisi peternakan yang maju, efisien, dan tangguh. Hal ini ditandai dengan kemampuan untuk menyesuaikan pola dan struktur produksi dengan permintaan pasar serta kemampuan untuk menyumbang terhadap pembangunan wilayah.

Dari data statistik Sumatera Barat tahun 2003 populasi sapi potong berjumlah 583.850 ekor dan untuk ternak besar 902.144 ekor. Bila dibandingkan dengan ketersediaan lahan, Sumatera Barat dapat menampung sekitar 3.250.000 ekor ternak besar.

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan populasi sapi potong berjumlah 79.202 ekor dan untuk ternak besar berjumlah 107.630 ekor. Sedangkan untuk Kawasan Agropolitan (Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Linggo Sari Baganti) jumlah ternak sapi yaitu 42.018 ekor dan ternak besar berjumlah 55.696 ekor serta lahan yang telah termanfaatkan baru sekitar 519 ha sedangkan lahan yang belum termanfaatkan masih banyak yaitu sekitar 10.962 Ha. (Data Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, 2003).

Oleh karena itu perlu adanya usaha dalam peningkatan produktifitas dan populasi ternak khususnya sapi. Usaha ini meliputi perbaikan mutu genetik dalam rangka penyediaan bibit unggul, pemberantasan penyakit menular, penanggulangan kegagalan reproduksi, dan pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB).

Pelaksanaan IB di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan baru di mulai pada tahun 1992. Daerah yang pertama kali melaksanakan IB yaitu Daerah Bayang dan

untuk kawasan Agropolitan daerah yang pertama kali dalam pelaksanaan IB adalah daerah Lengayang yang dilaksanakan pada tahun 1994 kemudian dilanjutkan pada daerah Sutera, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti.

Pelaksanaan IB pada empat Daerah ini belum menunjukkan keberhasilan yang cukup bagus hal ini terlihat dari besarnya S/C rata-rata yang diperoleh baru mencapai 6,3 dan CR 16,2 % (Kantor Peternakan Kabupaten Pesisir Selatan, 2003). Hal ini masih jauh dari target keberhasilan yang mana menurut Payne (1970) S/C yang baik dari pelaksanaan IB berkisar 1,3-1,6 dan CR 65 – 75 % (Dinas Peternakan Jawa Timur, 1978).

Menurut Madarisa (1998) keberhasilan penerapan teknis kawin suntik sapi tidak hanya dipengaruhi faktor ternak itu sendiri, tapi juga terkait dengan berbagai masalah yang bermuara pada persoalan sosial ekonomi antara lain :

- Berkaitan dengan tingkat keterjaminan bibit.
- Penyediaan bibit.
- Pengelolaan secara tepat waktu.
- Cocok dengan kebutuhan.
- Kemampuan Inseminator.
- Pengaturan dan mekanisme kerja seorang Inseminator.
- Mengidentifikasi birahi oleh peternak.
- Pelaporan kepada Inseminator.
- Makanan ternak itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah kemudian Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang penyerahan kewenangan keuangan Daerah. Untuk itu Pemerintah Sumatera Barat berkeinginan menjadi

Daerah lumbung ternak untuk Kawasan Indonesia bagian barat. Hal ini mendapat respon yang positif dari Pemerintahan Pusat yang menetapkan Sumatera Barat sebagai daerah sumber bibit untuk Wilayah Barat (khususnya sapi potong).

Konsep lumbung ternak di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan didukung dengan konsep pengembangan Kawasan Agropolitan dengan penerapan konsep agribisnis Peternakan melalui kegiatan pembuatan dan penyaluran sapronak, usaha produksi (budidaya), penyimpanan, pengelolaan serta penyaluran dan pemasaran. Dalam menggerakkan kegiatan tersebut didukung oleh lembaga penunjang seperti perbankan dan Kebijakan Pemerintah.

Keinginan itu tidak akan terwujud tanpa adanya usaha peningkatan populasi dan produksi ternak sapi, untuk itu pelaksanaan dan keberhasilan IB harus ditingkatkan. Upaya peningkatan pelaksanaan dan keberhasilan IB ini haruslah diringi dengan adanya suatu aturan-aturan atau prosedur yang mengikat tentang pelaksanaan pelayanan IB oleh Inseminator sendiri, disamping ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan oleh Instansi Pemerintah kepada masyarakat perlu disusun pedoman umum tentang penyelenggaraan pelayanan.

Pada saat ini Pemerintah Pusat bekerja sama dengan 6 Propinsi dan delapan Kab/Kota dengan bantuan teknis ADB melalui TA 3967 INO sedang dalam proses pengembangan dan mengkonsolidasi perumusan standar pelayanan yang harus dipenuhi (minimal) bagi semua jenis pelayanan publik. Untuk itu Kantor Peternakan Kabupaten Pesisir Selatan yang salah satu Instansi Pemerintah yang bergerak dalam

pelayanan publik (khususnya pelayanan Inseminasi Buatan) juga harus menyusun suatu pedoman umum penyelenggaraan pelayanan agar target dari pelaksanaan IB di Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat tercapai.

Atas dasar kondisi itulah perlu hendaknya Kantor Peternakan Kabupaten Pesisir Selatan dan bagi Inseminator khususnya untuk merumuskan suatu proses atau prosedur mengenai penyelenggaraan IB ini. Untuk itu saya berkeinginan sekali melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)**” (*Studi kasus : kawasan Agropolitan Kab. Pesisir Selatan*).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelayanan IB di Kawasan Agropolitan.
2. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan IB.
3. Berapa biaya yang dikeluarkan dalam proses pelaksanaan IB.
4. Pelayanan apa saja yang diterima peternak yang berkaitan dengan pelaksanaan IB.
5. Sarana dan Prasarana apa saja yang diperlukan demi tercipta dan lancarnya proses pelayanan IB di Kawasan Agropolitan.
6. Bagaimana kemampuan Inseminator dalam memberi pelayanan IB.

BAB V. KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

1. Prosedur Pelayanan Inseminasi Buatan di Kawasan Agropolitan masih belum teratur ini dikarenakan identifikasi tanda-tanda gejala birahi yang dilakukan oleh Peternak masih belum tepat.
2. Waktu Pelayanan Inseminasi Buatan yang dilakukan oleh Inseminator yang berada di Kawasan Agropolitan masih kurang tepat yaitu sebagian besar Inseminator datang lebih dari 6 jam setelah pelaporan.
3. Biaya Pelayanan Inseminasi Buatan yang berada di Kawasan Agropolitan pada umumnya 25.000 rupiah untuk satu kali IB. Sedangkan untuk IB yang ke dua sampai IB yang ke tiga rata-rata Peternak membayar hanya 10.000 Rupiah.
4. Selain IB pelayanan yang dilakukan oleh Inseminator yaitu berupa PKB, Keswan dan Proses Melahirkan.
5. Sarana dan Prasarana (Transportasi, Komunikasi) yang dimiliki oleh Peternak untuk menunjang proses pelaksanaan IB pada umumnya sangat minim sekali. Disini Peternak tidak mempunyai alat komunikasi, sedangkan untuk alat transportasi hanya (91,42 %) Peternak yang punya dan (8,57 %) Peternak tidak punya sama sekali mereka menggunakan jasa ojek atau menulis pesan untuk melapor kepada Inseminator. Untuk Inseminator yang berada di Kawasan Agropolitan belum mempunyai alat komunikasi sendiri (Telepon atau Hp). Sedangkan untuk alat dan bahan IB disediakan oleh Kantor Peternakan Kabupaten Pesisir Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadilaga, D.S. Djojosedarmo, M.R. Toelihere, M. A. Dasuki dan A. Adnan. 1974. *Evaluasi hasil kegiatan IB Jawa. 1972-1974*. Ditjen Peternakan, Jakarta.
- Adiwilaga. A. 1982. *Ilmu Usaha Tani*. Penerbit. Alumni, Bandung
- Daniel, M. 2003. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat. 2004, *Statistik Peternakan Propinsi Sumatera Barat*.
- Direktorat Bina Produksi Peternakan. 1985. *Pedoman Peningkatan Mutu ternak*, Direktorat Jendral Peternakan Universitas Andalas Padang.
- Dinas Peternakan Jawa Timur. 1978. *Laporan Tentang Hasil Pelaksanaan IB dan Program Sterilitas di Jawa Timur*, Dinas Peternakan Tingkat I Jawa Timur.
- Djanuar, R. 1985. *Fisiologi Reproduksi dan Inseminasi Buatan pada Sapi (Terjemahan dari Physiology of Reproduction and Artificial Insemination of Cattle oleh Salysbury Van Denmark 1961)*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Efrizal, Y. 2003. *Evaluasi pelaksanaan inseminasi buatan di Kab. Padang Pariaman*, Skripsi Fakultas Peternakan Universitas Andalas Padang.
- Ekokapti, S.D. 1989. *Efisiensi usaha sapi perah rakyat di Kecamatan Ngantang Kab. Malang Jawa Timur*. Tesis S2 Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian KPK. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Kantor Peternakan Kab. Pesisir Selatan. 2003, *Data Statistik Peternakan Kab. Pesisir Selatan*.
- Kasryno. 1984. *Kerangka Analisis Ekonomi Pedesaan dalam Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*, Yayasan Obor Jakarta.
- Madarisa, F. 1998. *Kendala Sosial Penerapan Kawin Suntik Pengalaman di Sumatera Barat*. Jurnal Peternakan dan Lingkungan. Vol 4. No .01 Februari 1998, Fakultas Peternakan Universitas Andalas Padang.
- Mattheiji, J. A. M, T. V. D. Lende, A. Osinga, 1986. *Reproduksi dan Dasar-Dasar Endokrinologi pada Hewan-Hewan Ternak (terjemahan oleh A. Winantea)* kerjasama Nuffic dan Universitas Brawijaya, Malang.
- Monsher, A.T. 1987. *Menggerakkan dan membangun pertanian*. CV Yasaguna. Jakarta
- Moenir, H. A. S. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta.